

SKRIPSI
IMPLIKASI PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR
168/PUU-XXI/2023 TERHADAP PENGATURAN
KETENAGAKERJAAN DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR
13 TAHUN 2023 TENTANG KETENAGAKERJAAN

Oleh :

ZAKI SHOLIHIN BALIN

UNIVERSITAS ANDALAS

2110113100

PROGRAM KEKHUSUSAN HUKUM TATA NEGARA (PK V)



FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ANDALAS

PADANG

2026

	No. Alumni Universitas	Zaki Sholihin Balin	No. Alumni Fakultas
	a. Tempat/Tgl Lahir : Padang/ 14 Januari 2002	f. Tanggal Lulus : 12 Agustus 2026	
	b. Nama Orangtua : Hannibal Husein, Aflinda	g. Predikat Lulus : Dengan Pujian	
	c. Fakultas : Hukum	h. Lama Studi : 5 Tahun 1 Bulan	
	d. PK : Hukum Tata Negara	i. IPK : 3,29	
	e. No. BP : 2110113100	j. Alamat : Perumahan Mangunsarkoro Blok c2 Kota Padang, Sumatera Barat	

IMPLIKASI PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 168/PUU-XXI/2023 TERHADAP PENGATURAN KETENAGAKERJAAN DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2023 TENTANG KETENAGAKERJAAN

(Zaki Sholihin Balin, 2110113100, Fak. Hukum Universitas Andalas, 96 Hlm, 2026)

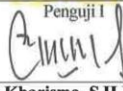
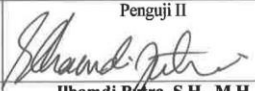
ABSTRAK

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 168/PUU-XXI/2023 merupakan putusan pengujian undang-undang yang membawa perubahan mendasar terhadap pengaturan ketenagakerjaan di Indonesia. Melalui putusan tersebut, Mahkamah Konstitusi tidak hanya mengubah dan memberikan penafsiran konstitusional terhadap sejumlah norma dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja, tetapi juga memerintahkan pembentuk undang-undang untuk membentuk undang-undang ketenagakerjaan yang baru dan terpisah dari Undang-Undang Cipta Kerja. Kondisi tersebut menimbulkan implikasi terhadap sistem pengaturan ketenagakerjaan, khususnya berkaitan dengan perlindungan hak-hak pekerja serta pembentukan peraturan perundang-undangan. Permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini yaitu: *pertama*, bagaimana tindak lanjut pembentuk undang-undang terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 168/PUU-XXI/2023.; *kedua*, bagaimana implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 168/PUU-XXI/2023 terhadap pengaturan ketenagakerjaan di Indonesia dari perspektif HAM. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan sifat penelitian deskriptif analitis. Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan peraturan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan kasus. Data diperoleh melalui studi kepustakaan yang didukung dengan wawancara terhadap pihak terkait, kemudian dianalisis secara kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa: *pertama*, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 168/PUU-XXI/2023 memperkuat perlindungan hak-hak pekerja melalui perubahan norma mengenai tenaga kerja asing, perjanjian kerja waktu tertentu, alih daya, pengupahan, pemutusan hubungan kerja, dan pesangon, sekaligus menegaskan pentingnya kepastian hukum dalam pembentukan peraturan perundang-undangan. *Kedua*, tindak lanjut pembentuk undang-undang terhadap putusan tersebut masih berada pada tahap penyusunan kebijakan legislasi sehingga diperlukan komitmen politik hukum dari pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat untuk segera membentuk undang-undang ketenagakerjaan yang baru sesuai dengan amanat Mahkamah Konstitusi, sehingga tercipta sistem hukum ketenagakerjaan yang lebih harmonis, memberikan kepastian hukum, serta menjamin perlindungan hak-hak pekerja dan iklim investasi yang berkembang.

Kata Kunci: Ketenagakerjaan, Cipta Kerja, Outsourcing

Skripsi ini telah dipertahankan di depan Tim Penguji dan dinyatakan lulus pada 12 Agustus 2026

Penguji,

Tanda Tangan	Penguji I 	Penguji II 
Nama Terang	Beni Kharisma, S.H.I, LL.M	Ilhamdi Putra, S.H., M.H

Mengetahui,

Ketua Departemen Hukum Tata Negara: **Arfiani. S.H., M.H**


Tanda Tangan

Alumnus telah mendaftar ke Fakultas/Universitas dan mendapat nomor alumnus:

	Petugas Fakultas/Universitas	
No. Alumni Fakultas	Nama:	Tanda Tangan:
No. Alumni Universitas	Nama:	Tanda Tangan:

	Alumni University Number		Zaki Sholihin Balin	Alumni University Number		
	a.	Place/Date of Birth	: Padang / 14 th January 2003	f.	Graduation Date	: 12 th August 2026
	b.	Parents' Name	: Hannibal Husein, Afinda	g.	Pass Predicate	: Cumlaude
	c.	Faculty	: Law	h.	Length of Study	: 5 years 1 months
	d.	Concentration	: Constitutional Law	i.	GPA	: 3,29
	e.	Student ID	: 2110113100	j.	Address	: Perumahan Mangunsarkoro Blok c2 Kota Padang, Sumatera Barat

IMPLICATIONS OF THE CONSTITUTIONAL COURT DECISION NUMBER 168/PUU-XXI/2023 ON EMPLOYMENT REGULATION IN LAW NUMBER 13 OF 2023 CONCERNING MANPOWER

(Zaki Sholihin Balin, 2110113100, Fak. Andalas University Law, 96 pp., 2026)

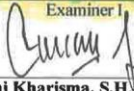
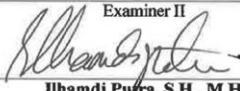
ABSTRACT

The Constitutional Court Decision Number 168/PUU-XXI/2023 is a law test decision that brings fundamental changes to the labor regulation in Indonesia. Through this ruling, the Constitutional Court not only amended and provided a constitutional interpretation of a number of norms in Law Number 6 of 2023 concerning Job Creation, but also ordered lawmakers to form a new labor law that is separate from the Job Creation Law. This condition has implications for the labor regulatory system, especially related to the protection of workers' rights and the formation of laws and regulations. The problems discussed in this study are: *first*, how to follow up with lawmakers on the Constitutional Court Decision Number 168/PUU-XXI/2023; *second*, what are the implications of the Constitutional Court Decision Number 168/PUU-XXI/2023 on the regulation of employment in Indonesia from a human rights perspective. This study uses a normative juridical research method with the nature of analytical descriptive research. The approaches used include a regulatory approach, a conceptual approach, and a case approach. Data was obtained through a literature study supported by interviews with related parties, then analyzed qualitatively. Based on the results of the study, it can be concluded that: *first*, the Constitutional Court Decision Number 168/PUU-XXI/2023 strengthens the protection of workers' rights through changes in norms regarding foreign workers, fixed-time work agreements, outsourcing, wages, termination of employment, and severance pay, while affirming the importance of legal certainty in the formation of laws and regulations. *Second*, the follow-up of the lawmakers to the decision is still in the stage of drafting legislation policies so that political and legal commitment is needed from the government and the House of Representatives to immediately form a new labor law in accordance with the mandate of the Constitutional Court, so as to create a more harmonious labor law system, provide legal certainty, and ensure the protection of workers' rights and the investment climate who are just.

Keywords: Employment, Job Creation, Outsourcing

This minor thesis has been successfully defended and regarded to graduate by August 12th, 2026.

Examiner,

Signature	Examiner I 	Examiner II 
Name	Beni Kharisma, S.H., LL.M	Ilhamdi Putra, S.H., M.H

Acquainted,

Head of the Department of Constitutional Law: **Arfiani, S.H., M.H.**


Signature

Alumnus has been registered in the Faculty/University under the number:

	Faculty/University Officer	
No. Alumni Faculty	Name:	Signature:
No. Alumni University	Name:	Signature:

**IMPLIKASI PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI
NOMOR 168/PUU-XXI/2023 TERHADAP PENGATURAN
KETENAGAKERJAAN DALAM UNDANG-UNDANG
NOMOR 13 TAHUN 2023 TENTANG
KETENAGAKERJAAN**

(Zaki Sholihin Balin, 2110113100, Hukum Tata Negara,
Fakultas Hukum, Universitas Andalas)

ABSTRAK

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 168/PUU-XXI/2023 merupakan putusan pengujian undang-undang yang membawa perubahan mendasar terhadap pengaturan ketenagakerjaan di Indonesia. Melalui putusan tersebut, Mahkamah Konstitusi tidak hanya mengubah dan memberikan penafsiran konstitusional terhadap sejumlah norma dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja, tetapi juga memerintahkan pembentuk undang-undang untuk membentuk undang-undang ketenagakerjaan yang baru dan terpisah dari Undang-Undang Cipta Kerja. Kondisi tersebut menimbulkan implikasi terhadap sistem pengaturan ketenagakerjaan, khususnya berkaitan dengan perlindungan hak-hak pekerja serta pembentukan peraturan perundang-undangan. Permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini yaitu: **pertama**, bagaimana tindak lanjut pembentuk undang-undang terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 168/PUU-XXI/2023.; **kedua**, bagaimana implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 168/PUU-XXI/2023 terhadap pengaturan ketenagakerjaan di Indonesia dari perspektif HAM. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan sifat penelitian deskriptif analitis. Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan peraturan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan kasus. Data diperoleh melalui studi kepustakaan yang didukung dengan wawancara terhadap pihak terkait, kemudian dianalisis secara kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa: **pertama**, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 168/PUU-XXI/2023 memperkuat perlindungan hak-hak pekerja melalui perubahan norma mengenai tenaga kerja asing, perjanjian kerja waktu tertentu, alih daya, pengupahan, pemutusan hubungan kerja, dan pesangon, sekaligus menegaskan pentingnya kepastian hukum dalam pembentukan peraturan perundang-undangan. **Kedua**, tindak lanjut pembentuk undang-undang terhadap putusan tersebut masih berada pada tahap penyusunan kebijakan legislasi sehingga diperlukan komitmen politik hukum dari pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat untuk segera membentuk undang-undang ketenagakerjaan yang baru sesuai dengan amanat Mahkamah Konstitusi, sehingga tercipta sistem hukum ketenagakerjaan yang lebih harmonis, memberikan kepastian hukum, serta menjamin perlindungan hak-hak pekerja dan iklim investasi yang berkeadilan.

Kata Kunci: Ketenagakerjaan, Cipta Kerja, *Outsourcing*, Pekerjaan Alih Daya